

BAB II

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Tangerang

Kecamatan Tangerang merupakan kecamatan yang terdapat di Kota Tangerang, yang terdiri dari 8 kelurahan. Kecamatan merupakan salah satu perangkat daerah kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.¹

Gambar 2.1. Peta Pembagian Wilayah Kecamatan



¹ Profil Kecamatan Tangerang, Peta pembagian wilayah kecamatan tangerang, Rabu 23 januari Tahun 2019.

²Profil Kecamatan Tangerang, Peta pembagian wilayah kecamatan tangerang, Rabu 23 januari Tahun 2019.

1. Letak Geografis

Secara geografis, Kecamatan Tangerang mempunyai batas wilayah :

- Sebelah utara, berbatasan dengan Kecamatan Neglasari.
- Sebelah selatan, berbatasan dengan Kecamatan Pinang dan Cipondoh.
- Sebelah timur, berbatasan dengan Kecamatan Batu Ceper.
- Sebelah barat, berbatasan dengan Kecamatan Karawaci.

Luas wilayah Kecamatan Tangerang sebesar 1.422,6 Ha, yang terdiri dari 8 Kelurahan yaitu Kelurahan Cikokol (417 Ha), Kelapa Indah (180 Ha), Babakan (185 Ha), Sukasari (187 Ha), Buaran Indah (160 Ha), Tanah Tinggi (180 Ha), Sukaasih (48 Ha), dan Sukarasa (95,6 Ha).³

2. Kondisi Demografis

a. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk di Kecamatan Tangerang pada tahun 2015 adalah sebanyak 149.439 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 76.438 jiwa dan perempuan sebanyak 73.001 jiwa.

³ Profil Kecamatan Tangerang, Peta pembagian wilayah kecamatan tangerang, Rabu 23 januari Tahun 2019.

Rata-rata tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Tangerang sebesar 18,679 orang/km². Tingkat kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kelurahan Tanah Tinggi sebesar 39.843 penduduk/km², sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kelurahan Sukarasa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 5.697 penduduk/km².

b. Pendidikan

Pada jenjang pendidikan dasar terdapat 56 Sekolah Dasar (SD) dan 3 Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang terdiri dari 39 SD Negeri dan 17 SD Swasta. Sementara jumlah penduduk di Kecamatan Tangerang yang berusia antara 7 – 12 tahun tercatat berjumlah 19.274 jiwa, yang terdiri atas 10.771 jiwa penduduk laki-laki dan 8.503 perempuan. Artinya rasio sekolah dasar perpenduduk usia sekolah dasar $56/19.274$ sekolah/penduduk adalah 0,290 %.

Adapun pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kecamatan Tangerang terdapat 28 SMP yang terdiri dari 14 SMP Negeri dan 14 SMP Swasta. Sementara itu jumlah penduduk Kecamatan Tangerang yang berusia antara 13 – 15

tahun tercatat sejumlah 4.843 jiwa terdiri atas 3.008 laki-laki dan 1.835 perempuan, sehingga rasio sekolah lanjutan tingkat pertama penduduk usia sekolah lanjutan tingkat pertama $28/4.843$ SLTP/penduduk adalah 0,578 %

Di wilayah Kecamatan Tangerang terdapat 28 sekolah menengah tingkat atas terdiri atas 11 sekolah menengah umum negeri, 16 sekolah menengah umum swasta dan 1 SMK. Dengan jumlah penduduk usia antara 16-18 tahun tercatat 5.298 jiwa, maka dapat diketahui rasio sekolah lanjutan tingkat atas per penduduk usia sekolah lanjutan tingkat atas adalah $28/5298$ SLTA/Penduduk adalah 0,528 %.⁴

B. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).

1. Sejarah DP3AP2KB

DP3AP2KB merupakan suatu lembaga pemerintah yang memiliki peranan dalam menangani permasalahan yang ada

⁴ Profil Kecamatan Tangerang, Peta pembagian wilayah kecamatan tangerang, Rabu 23 januari Tahun 2019.

di masyarakat terutama dalam menangani kasus anak-anak di Kota Tangerang. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Pada awalnya, sebelum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dibentuk bernama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB) pada tahun 2008, kemudian di tahun 2014 Sesuai Perda Nomor 13 Tahun 2014 diubah menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB), kemudian dibentuk menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) pada tahun

2016 berdasarkan Peraturan Walikota (Perwal) Tangerang Nomor 65 Tahun 2016, tentang kedudukan, susunan keorganisasian, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Menimbang ketentuan pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dinyatakan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.⁵

2. Visi dan Misi

a. Visi

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

⁵ Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) tahun 2014-2018.

menetapkan Visi Tahun 2014-2018 sebagai berikut:
 “Terwujudnya Masyarakat Mandiri dan Sejahtera yang Berakhlakul Karimah”. Pokok-pokok Visi yang terkandung dalam Visi DP3AP2KB tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Visi Misi Dinas Pemberdayaan
 Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian
 Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)⁶**

Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Pokok-Pokok Visi
Masyarakat Mandiri	Masyarakat yang maju, mampu berdaya saing, mempunyai rasa percaya diri.
Masyarakat Sejahtera	Masyarakat sejahtera artinya masyarakat yang memenuhi seluruh/sebagian kriteria: mapan di bidang ekonomi, mapan di bidang kesehatan, serta mapan di bidang pendidikan.
Masyarakat Akhlakul Karimah	Berakhlakul karimah artinya masyarakat yang agamis dan berbudi luhur.

⁶ Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)

b. Misi

- 1) Mewujudkan kapasitas kelembagaan dan SDM aparatur yang berkualitas, berintegritas dan profesional.

Penjelasan Misi: Peningkatan kualitas SDM dan sarana dan prasarana kelembagaan badan merupakan salah satu upaya untuk menciptakan *good governance* dan sarana badan yang memenuhi dan berkualitas, mutlak diperlukan sekaligus dapat untuk menjamin memenuhi kebutuhan pelayanan dinas dalam rangka mendukung berlangsungnya kegiatan.

- 2) Mewujudkan kemampuan dan keberdayaan serta kemandirian masyarakat.

Penjelasan Misi: Pengembangan kemampuan dan keberdayaan serta kemandirian masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan masyarakat Kota Tangerang, yang ditunjang dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi.

- 3) Mewujudkan kualitas hidup perempuan dan anak serta peran perempuan dalam pembangunan.

Penjelasan Misi: Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak serta peran dalam membangun salah satu potensi dalam menciptakan kondisi kemajuan baik dalam bidang politik, pengambilan keputusan maupun dalam bidang ekonomi dan sosial.

- 4) Mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.

Penjelasan Misi: Peningkatan keluarga kecil bahagia sejahtera yang merupakan salah satu upaya untuk pengendalian penduduk melalui pengaturan kelahiran dalam mempercepat kemajuan Kota Tangerang, yang dilakukan dengan kemajuan kegiatan ekonomi keluarga, keikutsertaan penduduk Kota Tangerang dalam ber KB.

- 5) Mengembangkan data dan informasi.

Penjelasan Misi: Pengembangan data dan informasi ditujukan untuk menunjang kelancaran

urusan yang ada di DP3AP2KB dengan menyediakan data yang berbasis teknologi.

- 6) Mewujudkan kapasitas kelembagaan dan SDM aparatur yang berkualitas, berintegritas dan profesional.

Penjelasan Misi: Peningkatan kualitas SDM dan sarana dan prasarana kelembagaan badan merupakan salah satu upaya untuk menciptakan *good governance* dan sarana badan yang memenuhi dan berkualitas, mutlak diperlukan sekaligus dapat untuk menjamin memenuhi kebutuhan pelayanan Dinas dalam rangka mendukung berlangsungnya kegiatan.

3. Tujuan DP3AP2KB

- a. Meningkatkan tata kerja tugas, fungsi dan manajemen SKPD
 - 1) Sasaran
 - a) Tersedianya berbagai jenis pelaporan pencapaian kinerja pelaksanaan dan kegiatan keuangan SKPD.

- b) Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi.
- c) Pelaporan pembangunan daerah yang disusun secara teknokratis (integratif, kompherensif, holistik) koordinatif dan parsitipatif serta informatif.
- d) Tersedianya data/informasi Perencana pembangunan daerah yang lengkap, valid, terbaharui,terstandar,serta terpublikasi dalam jaringan internet yang mudah diakses oleh publik.
- e) Tersedianya barang/jasa keadministrasian perkantoran.
- f) Terwujudnya publikasi informasi advertorial pelayanan SKPD kepada masyarakat pada media massa.
- g) Tersedianya aparatur SKPD yang memiliki kapasitas, kompeten, dan profesionalitas.

- h) Tersedianya pemenuhan dan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan daerah yang layak dan memadai.
- i) Meningkatnya ketersediaan pelayanan jasa rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur.
- j) Terwujudnya pemberdayaan masyarakat melalui usaha ekonomi keluarga.
- k) Meningkatkan ketersediaan data kualitas pengendalian penduduk dan informasi keluarga serta meningkatkan advokasi, penggerakan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB.

2) Strategi

- a) Pemantapan dan pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD.
- b) Membangun dan mengembangkan konsep tentang penyusunan dokumen perencanaan-penganggaran.

- c) Pengendalian dan evaluasi-pelaporan pembangunan daerah yang disusun secara teknokratis
- d) Membangun dan mengembangkan konsep tentang penyusunan dokumen perencanaan-penganggaran, pengendalian, dan evaluasi-pelaporan pembangunan daerah yang disusun secara teknokratis.
- e) Pemantapan dan pengembangan sistem pemenuhan sarana-prasarana dan keadministrasian perkantoran.
- f) Membangun dan mengembangkan kerjasama advertorial dengan media massa terkait informasi pelayanan SKPD.
- g) Pemantapan dan pengembangan sistem pembinaan kapasitas sumber daya aparatur.
- h) Pemantapan dan pengembangan sistem pemenuhan dan pengembangan kebutuhan sarana

dan prasarana perkantoran pemerintahan daerah yang layak dan memadai.

- i) Melakukan reorientasi, reposisi dan revitalisasi terhadap pengelolaan dan pengembangan sistem pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait dengan peningkatan keberdayaan masyarakat melalui kelembagaan masyarakat.⁷

3) Kebijakan

- a) Membangun dan meningkatkan sistem/tata cara pelaporan kinerja dan keuangan SKPD yang terpadu.
- b) Menyusun dokumen pengendalian, dan evaluasi – pelaporan pembangunan daerah.
- c) Secara teknokratis (integratif, komprehensif, holistik), koordinatif, dan partisipatif, serta informatif.

⁷Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) tahun 2014-2018.

- d) Menyusun dokumen Pengendalian, dan evaluasi-pelaporan pembangunan daerah secara teknokratis (integratif, komprehensif, holistik), koordinatif, dan partisipatif,serta informatif.
- e) Menyediakan pelayanan barang/jasa keadministrasian perkantoran berdasarkan standar.
- f) Melaksanakan kerjasamaadvetorial dengan media massa melalui publikasi informasi pelayanan SKPD selama tahun 2014-2018 sebanyak 60 kali.
- g) Memfasilitasi aparatur SKPD pemerintah daerah untuk mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan teknis/ operasional terkait tupoksi.
- h) Menyelenggarakan sosialisasi peraturan kedisiplinan aparatur SKPD pemerintah daerah secara intensif.
- i) Menyediakan pelayanan pemenuhan dan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana

perkantoran pemerintahan daerah yang layak dan memadai sesuai dengan standar yang berlaku.

j) Menyediakan pelayanan pemenuhan dan pengembangan kebutuhan pelayanan jasa rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur pemerintah yang layak dan memadai sesuai dengan standar yang berlaku.

k) Menyediakan dan mengembangkan sistem pelayanan kesejahteraan sosial-budaya-kemasyarakatan yang cepat, terjangkau, dan berkualitas, serta dilakukan secara profesional, proporsional, dan empatik, dengan didukung oleh sarana-prasarana yang layak dan memadai.⁸

b. Mendorong pembinaan dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak.

1) Sasaran

a) Terwujudnya peningkatan pemahaman dan kemandirian masyarakat (terutama perempuan) mengenai PUG dan KDRT.

⁸Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) tahun 2014-2018.

b) Terwujudnya kehidupan perempuan dan anak yang berkualitas dan berdaya saing.

2) Strategi

a) Melakukan reorientasi, reposisi, dan revitalisasi terhadap pengelolaan dan pengembangan sistem pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah terkait dengan penanganan KDRT dan PUG.

b) Meningkatkan akses perempuan untuk berperan serta dalam kegiatan publik, perumusan kebijakan publik dan pengambilan keputusan.

3) Kebijakan

a) Menyediakan dan mengembangkan sistem pelayanan kesejahteraan sosial-budaya-kemasyarakatan yang cepat dan menguatkan kelembagaan bagi pelayanan advokasi dan perlindungan hukum bagi anak dan perempuan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi.

- b) Meningkatkan berbagai inisiatif dan inovasi/terobosan positif terhadap bentuk kehidupan perempuan dan anak yang berkualitas.⁹
- c. Meningkatkan pelayanan KB yang berkualitas.
 - 1) Sasaran
 - a) Meningkatnya pelayanan KB yang sesuai dengan karakteristik keluarga dan terjangkau dari segi akses dan biaya.
 - 2) Strategi
 - a) Menyediakan dan mengembangkan sistem pelayanan kesejahteraan sosial-budaya-kemasyarakatan yang cepat, terjangkau, dan berkualitas.
 - b) Meningkatkan keluarga berencana yang proaktif, murah, dan ramah.

⁹Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) tahun 2014-2018.

3) Kebijakan

- a) Meningkatkan kualitas pelayanan keluarga berencana yang proaktif, murah, dan ramah.¹⁰

d. Meningkatkan ketersediaan data kualitas pengendalian penduduk dan informasi keluarga serta meningkatkan advokasi pergerakan dan pendayagunaan PLKB dan Kader KB.

1) Sasaran

- a) Tersedianya data kualitas pengendalian penduduk dan informasi keluarga serta meningkatkan advokasi, pergerakan dan pendayagunaan PLKB dan Kader KB.

2) Strategi

- a) Pemantapan dan pengembangan sistem pengelolaan data kualitas pengendalian penduduk dan informasi keluarga serta meningkatkan advokasi,

¹⁰Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) tahun 2014-2018.

penggerakan dan pendayagunaan PLKB dan Kader KB.

3) Kebijakan

- a) Memantapkan dan mengembangkan sistem pengelolaan data kualitas pengendalian penduduk dan informasi keluarga serta meningkatkan advokasi, penggerakan dan pendayagunaan PLKB dan Kader KB.¹¹

4. Struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Tahun 2014-2018.

- a. Kepala Dinas: Hj.Iis Aisyah Rodiah
- b. Sekretaris: Dr. H. A.Y.G Wigono, M. KES
- c. Bidang-bidang
- 1) Pemberdayaan Perempuan: Dra. Hj. Neneng Ely,SH,MM

¹¹Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) tahun 2014-2018.

- 2) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak : Ir. Hj. Irna Rudiana, M, SI.
- 3) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakkan: Dra. Drajat Widiajanto.
- 4) Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga: H. Umar Dani, S,Pd, M.Si
- 5) Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan : Yusnidar Simatupang, AMK dan Titin Anggraini.
- 6) Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak : Sabar A. Hasiholan, SH dan Muhammad Akib
- 7) Seksi Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga: Bahtiar,SH, Putri Syarita,dan Komarudin
- 8) Seksi Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak : Hj. Erna Ningsih, Sekar Lintang.
- 9) Seksi Pengendalian Penduduk Dan Informasi Keluarga : H. Dadang A. Kardiman,S.Sos. M.Si, Sarita Hanam, Skm, Wahyu Siswanto.

- 10) Seksi Jaminan Dan Pembinaan Kesertaan BER-KB
:Harni Widiastuti, Skm, M.Kes, Oktria Holilah, Nur Afriani, Tristi Dwi Veronita.
- 11) Seksi Advokasi, Penggerakkan dan Pendayagunaan PLKB Dan Kader KB: Dra, Hj. Edah Jubaedah, M, Si, Sugiarti, dan Aries Abdillah.
- 12) Seksi Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga: Dra. Qariah, MM, Wawan Waluyo.
- 13) SUB Bagian Keuangan: Yanti Rizkiyanti, Syahrudi, Brigda Hutabarat, Mutiah Sari Indah, Yahya.
- 14) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian: Soniyem, Fauji Ruslan, Rachmi, Chairi, Firdyanti.
- 15) Sub Bagian Perencanaan: Dra. Hj. Dewi. T, A, Udia Ratna, dan Abdullah Latif
- 16) UPT: Hj. Titik Surtika, AMD, Keb
- 17) Sub Bagian Tata Usaha: Nuraini Lc, MA.¹²

¹²Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) tahun 2014-2018.

5. Program kegiatan DP3AP2KB.

a. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.

- 1) Kota Layak Anak.
- 2) Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A).
- 3) Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)

b. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.

Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

c. Program peningkatan serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

- 1) Pembinaan gerakan sayang ibu.
- 2) Kegiatan pembinaan organisasi perempuan.
- 3) Peningkatan Kualitas Hidup KK Binaan P2WKSS.
- 4) Pembinaan Organisasi Perempuan bagi TP PKK.

- 5) Pembinaan Organisasi Perempuan bagi DWP Kota Tangerang.
- 6) Kegiatan Penunjang Hari Ibu Tingkat Kota Tangerang.

d. Program Keluarga Berencana.

- 1) Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin.
- 2) Pembinaan Keluarga Berencana.
- 3) Pelayanan KIE.

e. Program Pelayanan Kontrasepsi

- 1) Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB.
- 2) Pelayanan konseling KB.

f. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga.

- 1) Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga dikecamatan
- 2) Pembinaan kelompok UPPKS

g. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR.

- 1) Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling
KRR

**h. Program Pengembangan Model Operasional BKB-
Posyandu-PADU.**

- 1) Pembinaan posyandu

**i. Program Pembinaan Peran Serta masyarakat Dalam
Pelayanan Keluarga Berencana/ Kesejahteraan
Rakyat yang Mandiri.**

- 1) Pengelolaan data keluarga dan KB KS
- 2) Peningkatan tata kelola data dan informasi keluarga
berbasis teknologi informasi
- 3) Rakerda Program KB KS.¹³

**6. Rekap Data Pengaduan Kasus Kekerasan, Pelecehan,
dan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota
Tangerang Tahun 2018-2019**

¹³Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) tahun 2014-2018.

Tabel: 2.2 Pengaduan Kasus Kekerasan, Pelecehan, dan Kekerasan Seksual Terhadap Anak tahun 2018¹⁴

No	Bulan	Korban		Jenis kasus				Jumlah	Ket
		Laki-laki	Perempuan	Pemeriksaan	Pelecehan	Kekerasan	Lainnya		
1	Jan		6	1	3	1		5	
2	Feb	1	2	1			1	2	
3	Mar							0	
4	Apr		2	1	2		1	4	
5	Mei	4	8	4	2		1	7	
6	Jun	1	3	1	1			2	
7	Jul							0	
8	Ags	2	5	8		1		9	
9	Sept	3	4	4			1	5	
10	Okt	1	3	2	2		1	5	
11	Nov	2	1	2	1	1	1	5	
12	Des		3	3				3	
Total		14	37	27	11	3	6	47	

¹⁴ Data kekerasan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). 2018-2019.

Tabel: 2.3 Pengaduan Kasus Kekerasan, Pelecehan, dan Kekerasan Seksual Terhadap Anak tahun 2019¹⁵

No	Bulan	Korban		Jenis kasus					Jumlah	Ket
		Laki-laki	Perempuan	Pornografi	Pemeriksaan	pelecehan	Kekerasan	Lainnya		
1	Jan		4		4		1	1	6	
2	Feb	1	2		1	2	1	1	5	
3	Mar		6		2		2	2	6	
4	Apr	4	3		1	2		1	4	
5	Mei		2		1	1			2	
6	Jun		3		3			1	4	
7	Jul		4			4			4	
8	Ags	5	6	1		3	1	3	8	
9	Sept		2			1		1	2	
10	Okt		2				1	2	3	
11	Nov		4		3		1		4	
12	Des								0	
Total		10	38	1	15	12	9	12	48	

¹⁵ Data kekerasan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). 2018-2019.

Dari tabel diatas banyak jenis kasus kekerasan yang dialami oleh anak-anak, di tahun 2018 ada 47 anak yang mengalami kasus seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, kekerasan dan kasus lainnya. Diantaranya 10 orang laki-laki dan 37 orang perempuan yang ditangani oleh DP3AP2KB. Sedangkan di tahun 2019 sekitar 48 orang yang mengalami hal serupa, untuk laki-laki ada 10 orang yang ditangani oleh DP3AP2KB dan 38 orang perempuan. Hal tersebut sangat memperihatinkan, maka dari itu DP3AP2KB membantu menangani permasalahan-permasalahan yang dialami oleh anak-anak Indonesia. Agar anak-anak Indonesia terhindar dari trauma yang berkepanjangan dan menghambat cita-cita dan segala harapan yang ingin anak-anak itu wujudkan dan juga anak-anak yang mengalami permasalahan tersebut, bisa hidup normal kembali seperti anak-anak pada umumnya.